

# Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo

Budhi Cahyono

Ardian Adhiatma

Universitas Islam Sulatan Agung Semarang

[budhicahyono@yahoo.com](mailto:budhicahyono@yahoo.com)

[ardian\\_adhi@yahoo.com](mailto:ardian_adhi@yahoo.com)

## Abstrak

*Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi, serta sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999). Namun demikian Fukuyama (2000) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Dimana trust ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Populasi dalam penelitian terdiri dari petani tembakau, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah kecamatan dan desa dari delapan desa yang terpilih sebagai sampel. Sementara itu jumlah responden sebanyak 104 orang, yang terdiri dari 80 petani tembakau, 16 tokoh masyarakat, 16 perangkat desa, dan 2 orang perangkat kecamatan. Variabel penelitian meliputi kajian ekonomi, sosial budaya, kajian demografi, karakteristik petani tembakau, dan efektivitas modal sosial. Pengumpulan data dengan menggunakan focus group discussion (FGD) dengan responden, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kepercayaan dalam modal sosial sangat dominan sebagai dasar bagi masyarakat pedesaan untuk dijadikan modal dalam peningkatan fungsi yang lain, seperti peningkatan respek dan keuntungan bersama. Permasalahan dalam optimalisasi modal sosial menyangkut masalah alam, masalah sumber daya manusia, dan masalah manajemen. Sementara itu untuk mengoptimalkan peran modal sosial di pedesaan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seiring dengan tuntutan masyarakat pedesaan terkait dengan pentingnya program pendampingan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan ketrampilan bertani, dan meningkatkan diversifikasi pertanian. Selain itu juga perlunya dukungan kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan optimalisasi peran modal sosial.*

**Kata-kata Kunci:** *Modal sosial, kesejahteraan, kepemimpinan transformasional, pendampingan*

## LATAR BELAKANG

Problem kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus dan dicarikan solusinya. Gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari model pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya, orientasi kepada pertumbuhan dicoba untuk diseimbangkan dengan orientasi pada pemerataan, salah satunya tampak pada program-program spesifik penanggulangan kemiskinan.

Asumsi paradigma ini adalah pertumbuhan tidak cukup sehingga perlu ada kebijakan distribusi dan redistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Pada perkembangan berikutnya terjadi pergeseran paradigma ke arah pemberdayaan masyarakat, dimana orang miskin tidak lagi dilihat sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku pembangunan, dan proses pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsep *people centered development* dan *bottom-up development planning* menjadi wacana pembangunan yang banyak diadopsi dalam proses kebijakan publik. Sebagai kelanjutan dari paradigma pemberdayaan masyarakat berkembang wacana pengutamaan kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan harus didekati melalui penerapan strategi yang komprehensif yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan juga keamanan (Darwin, 2005).

Modal sosial telah diyakini mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan anggotanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, yang meyakini bahwa modal sosial merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya.

Oleh Aldler dan Kwon (2000) disebutkan bahwa modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Dasgupa dan Serageldin (1999), dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Sementara itu, Coleman (1999) juga menekankan bahwa dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran reformasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat.

Berbeda dengan pendapat Fukuyama

(1995), yang menyatakan bahwa norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku otomatis menjadi modal sosial. Modal sosial yang sebenarnya hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*), dimana *trust* merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya.

Dimensi modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga perlu pengembangan nilai-nilai yang harus dianut oleh anggotanya, seperti: sikap partisipatif, sikap saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, dan saling percaya mempercayai. Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999).

Namun demikian Fukuyama (1995, 2000) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Dimana *trust* ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari

dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Modal Sosial

Supriono (2008) menyatakan modal sosial merupakan hubungan hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama. Coleman (1999), modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi.

Burt (1992) mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantaramereka. Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang

tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*sosial glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Pada jalur yang sama Solow (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Adapun menurut Cohen dan Prusak L. (2001), modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Senada dengan Cohen dan Prusak L., Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.

Aspek kepercayaan menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di pedesaan, sementara aspek lainnya (kerjasama, jaringan kerja), tidak akan terbentuk dengan baik jika tidak dilandasi oleh terbentuknya hubungan saling percaya (*mutual-trust*) antar anggota masyarakat. Kekuatan

kerjasama dan jaringan kerja yang terbentuk di masyarakat adalah pengembangan operasional dan hubungan saling percaya antar anggota masyarakat di bidang sosio-budaya, ekonomi dan pemerintahan. Dalam kehidupan sosial di pedesaan, pengertian kepercayaan seharusnya tidak dilihat sekedar sebagai masalah personalitas atau intrapersonal, melainkan mencakup juga aspek ekstrapersonal dan intersubjektif.

Terbentuknya saling percaya menurut (Pranaji, 2006) adalah hasil interaksi yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetangaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa. Pada suatu masyarakat ketetangaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal dan persaudaraan yang lebih banyak diwarnai nilai-nilai primordial atau askriptif.

Tata nilai yang tampak dalam masyarakat umumnya bisa dilihat dari empat hal: (1) Ditegakkannya sistem sosial di pedesaan yang berdayasaing tinggi (produktif) namun berwajah humanistik (tidak eksploitatif dan intimidatif terhadap sesama manusia atau masyarakat). (2) Ditegakkannya sistem keadilan yang dilandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (tidak imperialistik dan menegasi kehidupan sosial). (3) Ditegakkannya sistem solidaritas yang dilandaskan pada hubungan saling percaya (*mutual*



*trust*) antar elemen pembentuk sistem masyarakat. (4) Dikembangkannya peluang untuk mewujudkan tingkat kemandirian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang merupakan salah satu bagian terpenting keberadaan suatu masyarakat.

### Studi Pendahuluan

Budhi dan Ardian (2009) mengidentifikasi menemukan adanya masalah yang kompleks di Kabupaten Wonosobo. Permasalahan bidang sosial budaya, antara lain: masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya petani tembakau, yaitu antara SD sampai SLTP. Tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah yang ditandai dengan pola hidup yang kurang sehat, gizi masyarakat rendah, dan sarana/prasarana kesehatan yang masih kurang memadai. Permasalahan bidang lingkungan yaitu semakin berkembangnya usaha pertambangan darat baik secara individu maupun kelompok, pada kecamatan-kecamatan tertentu (Kecamatan Kertek, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Mojotengah) yang tentunya dalam jangka panjang akan merusak ekosistem dan penurunan kualitas sumberdaya alam dan makin berkurangnya kawasan terbuka karena desakan kebutuhan ekonomi sesaat yang membuat masyarakat mengeksploitasi sumberdaya alam secara terus-menerus dan melampaui kemampuan daya dukungnya. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya lahan yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya atau terdegradasinya sumberdaya alam secara menyeluruh.

Permasalahan daerah Kabupaten Wonosobo seperti yang tertuang dalam

rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonosobo (tahun 2006-2010), antara lain: permasalahan bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Permasalahan bidang ekonomi meliputi: *Pertama*, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo, yaitu 2,1% per tahun sehingga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang mengindikasikan tingkat produktivitas masyarakat masih rendah sehingga belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. *Kedua*, masih tingginya tingkat kemiskinan dengan jumlah keluarga pra sejahtera mencapai 57,3% pada tahun 2005. Masih banyaknya jumlah angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja, nilai ekspor non-migas yang cenderung mengalami penurunan, belum berkembangnya sektor pariwisata yang ditandai dengan semakin menurunnya jumlah kunjungan wisata yang mencapai 6,36% per tahunnya.

Kajian yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Wonosobo (2006), menunjukkan bahwa masalah utama kemiskinan adalah: keterbatasan, kepemilikan aset, dan minimnya infrastruktur, informasi dan kapabilitas SDM. Aspek ketidakberdayaan masyarakat sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat kapabilitas untuk menuju pada penghidupan yang lebih baik. Ketidakberdayaan disebabkan oleh kebijakan sektoral yang belum sepenuhnya difokuskan atau berpihak pada masyarakat miskin, misalnya: sektor pendidikan, sektor kesehatan, program-program pemerintah (BLT, SPP gratis, Dana BOS). Biaya pendidikan sudah dibantu oleh pemerintah, namun untuk keperluan uang saku dan transport masih kesulitan,

mengingat jarak rumah ke sekolah mereka cukup jauh. Tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini berkaitan dengan perilaku hidup mereka yang tidak sehat. Upaya masyarakat miskin untuk menjaga kesehatan juga terhambat oleh rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Jarak dan biaya merupakan faktor utama yang menentukan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah terhadap komunitas miskin sedikit membantu mereka, namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga komunitas miskin malah tidak mendapatkan manfaatnya. Program BLT cenderung menjadikan orang berlomba-lomba untuk disebut miskin karena berharap akan mendapatkan bantuan.

Aspek keterisoliran juga menjadi masalah mendasar bagi masyarakat miskin. Keterisoliran dapat bersifat fisik dan psikis. Keterisoliran fisik terkait dengan infrastruktur, akses informasi, akses transportasi. Keterisoliran fisik yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: sarana dan prasarana yang tidak menunjang, seperti jalan yang berbatu dan becek. Kekurangan infrastruktur dapat menyebabkan transportasi mahal, sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk mengembangkan SDM-nya. Selain itu jarak yang jauh dari pusat kecamatan dan pusat ekonomi mengakibatkan akses informasi kurang. Keterisolasian psikologis ditunjukkan oleh keberadaan kelompok tani yang tidak berfungsi. Kelompok tani hanya berfungsi pada saat adanya proyek dan belum semua komunitas miskin ikut

dalam kelompok, selain itu komunitas miskin belum banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga sosial yang ada seperti KUD, LKMD, Gapoktan, PKK, dan BPD juga belum berperan dalam merespon kebutuhan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan oleh kurangnya informasi, baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.

Kaitannya dengan potensi dan kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan pekerjaan responden sebagai petani tembakau, maka akan dipaparkan potensi dan kendala. Usia penduduk desa didominasi oleh penduduk berusia antara 17-50 tahun (55%). Tingkat pendidikan penduduk desa sebanyak 70% lulusan SD. Sementara itu mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani, buruh tani, dan swasta. Pertanian sayuran memiliki lahan yang paling luas, yaitu sebanyak 34% dari total area pertanian yang ada, disusul oleh pertanian palawija, sayuran, dan tembakau.

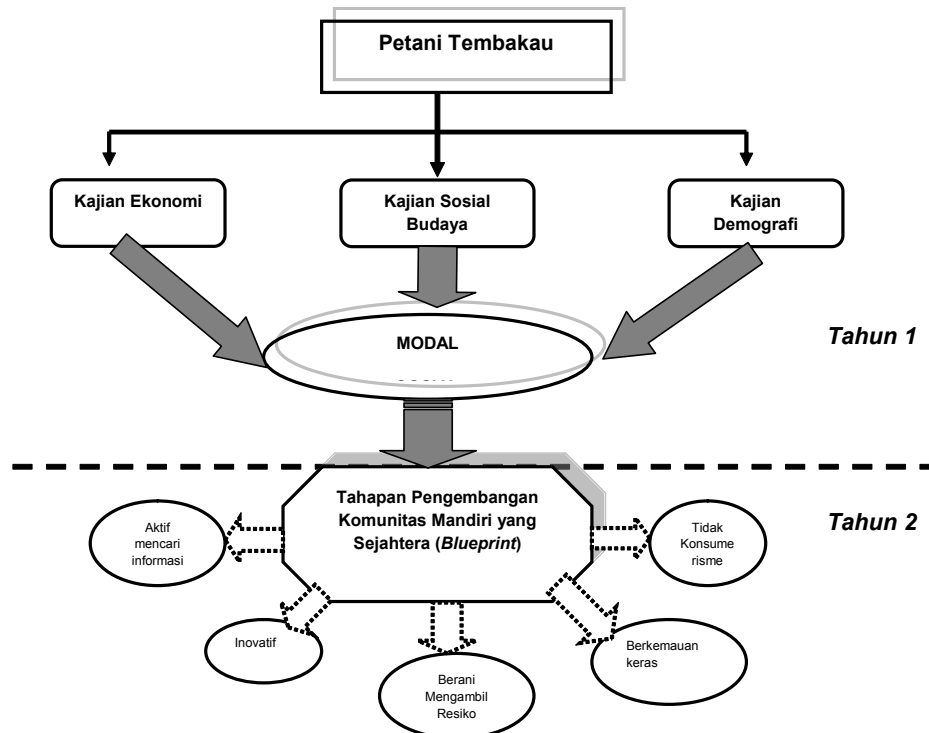
## **METODE PENELITIAN**

### **Kerangka Penelitian**

Dalam kerangka proses penelitian pada dasarnya menggambarkan alur penelitian atau kajian yang akan dilaksanakan, sehingga tahapan kegiatan penelitian dapat bersifat sistematis. Kajian pertama diawali dengan kajian tentang keberadaan kegiatan para petani tembakau, dengan lebih banyak menggunakan data skunder. Kajian difokuskan pada kajian ekonomi, sosial budaya, kajian lingkungan, dan demografi yang dimaksudkan untuk mendapatkan

lebih lengkap tentang karakteristik petani tembakau. Untuk lebih memperdalam kajian, maka dilakukan kajian tentang model pemberdayaan bagi petani tembakau.

*research*, *Critical action research*, dan *Institutional action research*. Dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian antara lain: profil petani



**Gambar 3.1.**  
**Kerangka Proses Penelitian**

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *action research* yang menekankan pada action atau tindakan. Peneliti melakukan tindakan atau eksperimen yang secara khusus diamati secara terus menerus, dilihat kelebihan dan kekurangannya, kemudian diadakan perubahan terkontrol sampai pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan yang paling tepat (Suharsini, 2009). Ciri paling penting dalam *action research* adalah bahwa penelitian merupakan suatu upaya untuk memecahkan masalah, sekaligus mencari dukungan ilmiahnya.

Dalam penelitian ini akan digunakan tiga pendekatan, yaitu: *Participatory action*

tembakau, kajian ekonomi, kajian sosial budaya, kajian demografi, dan modal sosial (kompetensi SDM, manajemen sosial, organisasi sosial, dan kepemimpinan). Jumlah sampel sebanyak 104 orang, yang terdiri dari 80 petani tembakau, 16 tokoh masyarakat, 16 perangkat desa, dan 2 orang perangkat kecamatan. Adapun sampel diambil dari delapan desa yang ada di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Ke delapan desa tersebut adalah: Desa Tlogomulyo, Damar Kasian, Pagerejo, Candimulyo, Purbosono, Candiyan, Kapencar, dan Reco.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini responden penelitian

terdiri dari: petani tembakau, aparat kecamatan, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Para responden berasal dari delapan desa di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kedelapan desa meliputi: desa Tlogomulyo, Damar Kasian, Pagerejo, Candimulyo, Purbosono, Candiyan, Kapencar dan Reco. Sementara itu komposisi responden terdiri dari: petani tembakau berjumlah 80 orang, aparat desa berjumlah 16 orang, tokoh masyarakat 16 orang, dan pemerintah kecamatan dua orang (Camat dan Sekretaris Camat). Berbagai modal sosial yang diidentifikasi meliputi: Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, Kelompok tani, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Modal sosial di pedesaan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk meningkatkan peran mereka dalam berbagai kegiatan, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Berbagai sarana modal sosial yang ada sebenarnya telah memberikan media bagi masyarakat desa untuk bergabung dalam rangka memikirkan peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata frekwensi pertemuan warga desa di Kecamatan Kertek adalah 35 hari sekali atau *selapanan*, untuk kelompok modal sosial BPD, Koperasi, Kelompok tani, PKK, dan BUMDes. Walaupun demikian ada beberapa modal sosial yang frekwensi pertemuannya tiga bulan sekali, misalnya pertemuan LKMD dan Gapoktan. Frekwensi pertemuan yang cenderung rutin setiap bulannya mengindikasikan bahwa

modal sosial yang ada di Kecamatan Kertek sebenarnya merupakan modal yang kuat bagi masyarakat pedesaan sebagai bentuk kepercayaan diantara warga desa.

Menurut Pranaji (2006), terbentuknya saling percaya adalah hasil interaksi yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetangaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa.

Pada suatu masyarakat ketetangaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal dan persaudaraan yang lebih banyak diwarnai nilai-nilai primordial atau askriptif. Saling percaya diantara anggota organisasi sebagai dasar untuk menciptakan daya tangga diantara anggota, dan juga dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bersama.

Nilai-nilai kepercayaan dan daya tanggap di antara anggota akan menimbulkan kerjasamadan solidaritas. Nilai kepercayaan diantara anggota dan keuntungan bersama akan menciptakan jaringan dan kebijakan. Sementara daya tanggap dan keuntungan bersama akan menciptakan persaingan dan keberlangsungan usaha.

### **Modal Sosial dan Produktivitas**

Sebagai keunggulan dalam pengelolaan modal sosial di Kecamatan Kertek adalah frekwensi pertemuan dari para anggota cenderung rutin, yaitu setiap sebulan



sekali. Tingkat kehadiran masyarakat desa juga sangat tinggi, setiap pertemuan rata-rata dihadiri oleh 44 orang, dengan jumlah terbesar yang hadir pada modal sosial Gapoktan, koperasi, dan BPD.

Adapun materi pertemuan dan diskusi untuk masing-masing kelompok modal sosial berbeda-beda. Badan Perwakilan Desa dalam pertemuannya lebih menekankan permasalahan pada tingkat desa, misalnya: pertanian, peternakan, pembuatan pupuk organik, harga tanaman pada tingkat petani, kesuburan tanaman tembakau, cara menanam tembakau, cara memupuk tembakau, perkembangan pemerintahan desa, membahas kemajuan pembangunan desa. Sementara untuk Gapoktan diskusi difokuskan pada: peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, pemanfaatan pupuk organik dan pupuk caik, pengadaan benih, pupuk, perawatan pembibitan jagung, pengolahan limbah atau kotoran sapi, penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, manajemen panen, pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi, dan evaluasi pinjaman.

Dalam modal sosial LKMD, menekankan pada pembicaraan tentang pembangunan jalan, prioritas pembangunan di desa, peningkatan kompetensi SDM desa, membahas program pembangunan desa, rencana kerja desa, dan evaluasi kerja pembangunan desa. Pada tataran ibu-ibu, di desa telah ada PKK yang memfokuskan pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai modal sosial di desa, kegiatan PKK dilakukan setiap bulan sekali, dengan kegiatan meliputi: penyuluhan pola hidup sehat dan bersih, bersih lingkungan, membaca

yasin dan tahlil, posyandu, mengatasi gizi buruk, dan peningkatan ketrampilan ibu dan anak.

Modal sosial dalam suatu negara merupakan penentu utama dalam komposisi dan pertumbuhan dari output dan ekspor negara. Sebagai contoh: kesehatan dan makanan yang cukup akan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, masyarakat pedesaan. Dalam bidang pertanian terbukti bahwa terdapat dampak positif modal sosial terhadap produktivitas diantara para petani yang menggunakan teknologi modern, dibanding dengan penggunaan metode tradisional.

Di Thailand, petani yang menempuh pendidikan empat tahun atau lebih memiliki tiga kali kemungkinan mengadopsi dapat mengadopsi input-input modern dibanding dengan yang berpendidikan rendah (Birdsall, 1993). Modal sosial juga sangat penting kontribusinya terhadap kapasitas teknologi dan perubahan teknis dalam industri. Ottoson and Klyver (2010), dalam penelitiannya tentang dampak modal manusia terhadap modal sosial dengan responden para entrepreneur menunjukkan bahwa keduanya saling menciptakan kerjasama yang produktif, dan peningkatan peningkatan kualitas human capital akan meningkatkan pula level sosial capital dengan seketika. Becker (1993) menyatakan bahwa konsep modal manusia (level pendidikan, *self efficacy*, dan pengalaman) mengacu pada sebuah investasi sehingga seseorang mengharapkan pengembalian secara ekonomi. Modal manusia merupakan sebuah terminologi ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan atribut-atribut produktif dari seseorang.

Kajian tentang human capital telah banyak dilakukan, dan implikasinya dalam bentuk pendidikan, manajemen, industri, dan entrepreneurship. Modal manusia menggunakan tiga faktor, yaitu level pendidikan, *self efficacy*, dan pengalaman, sementara variabel sosial capital menggunakan indikator kepercayaan, join nilai atau norma, dan sumberdaya sosial yang mendukung struktur sosial.

Modal sosial dalam masyarakat hendaknya dipahami bahwa di dalam suatu komunitas terdapat keragaman (agama, budaya, kepentingan, status sosial, pendidikan, pendapatan, keahlian, gender) dari anggotanya, sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap keragaman tersebut. Sementara itu pemahaman nilai-nilai, norma menjadi hal yang penting. Unsur-unsur penting dalam modal sosial antara lain; rasa memiliki diantara anggota, jaringan kerjasama, rasa kepercayaan dan jaminan keamanan para anggota, saling memberi satu sama lain, saling berpartisipasi, dan bersikap proaktif.

### **Modal sosial dan Pertumbuhan Ekonomi**

Berbagai modal sosial yang ada di pedesaan disinyalir telah mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat pedesaan dengan mendasarkan pada prinsip kepercayaan, saling mendukung, dan keuntungan bersama. Ketiga prinsip ini pada dasarnya sudah dimiliki oleh masyarakat desa sebagai modal sosial. Namun demikian untuk mencapai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, keberadaan modal sosial masih perlu ditingkatkan perannya dengan

melibatkan masyarakat desa secara proaktif. Masyarakat telah merasakan manfaat adanya modal sosial, seperti: bertambahnya wawasan, pengalaman, kerukunan, swadaya masyarakat semakin meningkat, kelestarian lingkungan, kesehatan balita, persatuan antara warga, tukar pengalaman, kekompakan, silaturahmi, kesinambungan program, meningkatkan komunikasi, aspirasi masyarakat tertampung, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Fukuyama (2000) menyatakan bahwa modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme cultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal sosial lebih menekankan pada komunitas moral dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan seperti: kesetiaan, kejujuran, dan dependability. Easterling (2009) menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial tinggi akan memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, ekonomi lebih kuat, dan system lebih baik untuk pendidikan dan kepedulian kepada anak muda.

Abdullah dkk (2011), menyatakan bahwa kepercayaan dan kerjasama memediasi hubungan antara kontrak psikologikal dan sharing knowledge. Ali dkk (2011), konsep sosial capital sebagai penentu penting dalam pengembangan ekonomi dan menjadi daya tarik para ekonom. Sosial capital juga sebagai faktor dasar dalam pembangunan. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat mencapai keberlangsungan ekspansi ekonomi tanpa melakukan investasi dalam human capital. Sosial capital merupakan sebuah norma informal yang mengandalkan kerjasama diantara anggotanya, dan dapat memperkaya pemahaman orang-orang terhadap dirinya sendiri dan dunia.

**Modal sosial dan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dan masyarakat sebagai indikator kesuksesan pembangunan di pedesaan menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan pembangunan. Modal sosial sebagai wahana dalam pencapaian kesejahteraan sosial hendaknya bukan hanya merupakan kegiatan rutinitas bagi para warga, namun juga harus mampu menampung berbagai permasalahan dan melakukan pemecahan masalah. Permasalahan-permasalahan utama di pedesaan kecamatan Kertek, kabupaten Wonosobo dapat dibagi menjadi tiga masalah, yaitu: masalah alam, masalah sumber daya manusia, dan masalah manajemen.

Masalah yang terkait dengan alam di Kabupaten Wonosobo yang memiliki dampak langsung terhadap para petani tembakau adalah masalah cuaca yang kadang kurang mendukung, masalah hama perusak tanaman (jangkrik, belalang, keong, dan penyakit), busuk akar. Sementara itu masalah sumber daya manusia (SDM) terkait dengan kurangnya tingkat ketrampilan warga desa, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pertemuan-pertemuan, kurangnya disiplin dalam pengembalian pinjaman, rendahnya pendidikan masyarakat, kehadiran warga kurang dalam mengikuti pertemuan di desa. Permasalahan manajemen juga menjadi masalah yang sangat serius di kecamatan Kertek. Seperti manajemen permodalan yang digunakan untuk penanaman tembakau, manajemen pemasaran hasil pertanian, anggaran kegiatan PKK yang sangat minim.

Untuk menanggulangi berbagai

permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tentunya perlu keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah provinsi dan pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara untuk meningkatkan optimalisasi modal sosial. Cara pertama adalah dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhannya. Perlu juga dilakukan bimbingan dalam pemasaran hasil produksi, pelatihan-pelatihan teknis bertani dan bercocok tanam yang efektif, bantuan sarana dan prasarana (pupuk, alat rajang tembakau, obat-obatan), dan pelatihan terkait dengan akses modal bagi para petani.

Fukuyama menyatakan sedikitnya ada dua kontribusi utama modal sosial terhadap pembangunan, yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi politik. Secara ekonomi, fungsi modal sosial adalah untuk mengurangi biaya transaksi dikaitkan dengan mekanisme koordinasi formal, seperti kontrak, hirarki, aturan birokrasi, dan kepentingan. Secara politik, modal sosial dapat mendorong demokrasi yang diwujudkan dalam dinamika civil society yang beroperasi di dalam sikap saling percaya antar sesama warga, serta antara warga dan negara. Fukuyama (1999), negara atau pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penciptaan modal sosial melalui penyediaan public goods yang penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak hanya merupakan instrument yang bias mengeneralisasi modal sosial, melainkan pula mencerminkan adanya

good governance dan trust diantara Negara dan warga negara. Negara memberikan jaminan sosial kepada warganya sebagai timbal balik atas kepercayaan warga kepada negaranya dalam membayar pajak.

## PENUTUP

Tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan modal sosial, dan *community development*. Penguatan sosial dapat dilakukan dengan mengembangkan skema-skema penguatan modal sosial, seperti peningkatan fungsi BPD, LKMD, Gapoktan, PKK, BUMDes, dan Koperasi. Penguatan sosial kapital dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga-lembaga sosial dengan memfokuskan pada penguatan aspek kepercayaan, mutual respect, dan mutual benefit, serta memperhatikan faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku.

Dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat (bangsa) untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama, dimana kerjasama ini diwarnai oleh suatu pola inter-relasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Adapun kekuatan kerjasama ini akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

Implikasinya bahwa perlu adanya keragaman program-program yang dengan mengutamakan pada peningkatan kemampuan human kapital dan sosial kapital masyarakat. Implikasi untuk entrepreneurship dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan mengkondisikan bahwa *human capital* dan *social capital* saling mendukung terhadap produktivitas dan kesejahteraan.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui optimalisasi modal sosial harusnya didukung dengan kepemimpinan transformasional yang mampu mempengaruhi anggota masyarakat melalui perubahan status quo, meningkatkan kreativitas individual, memberikan inspirasi dan motivasi, serta memiliki idealisme. Modal sosial hendaknya didukung pula oleh human capital yang mampu memberikan inovasi-inovasi para anggota masyarakat. Program pendampingan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan ketrampilan bertani, dan meningkatkan diversifikasi pertanian.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamzah, Arshad (2011). Psychological contact and knowledge sharing among academicians: Mediating role of relational sosial capital. *International business research*, vol. 4, No. 4 October 2011
- Ali, Naseem, and Farooq (2011). *Sosial capital impact on economic development (A theoretical perspective)*. *International Journal Business*



- Ali, Naseem, dan Farooq (2011). Sosial capital impact on economic development (a theoretical perspective).
- Arikunto, Suharsimi (2009); *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktek*; PT Bina Aksara, Jakarta.
- AsmadiAlsa(2006); Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi; Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Chicago, University of Chicago Press.
- BPS (2006). Tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006. Berita resmi statistik BPS No. 47/IX/1 September 2006
- Budhi dan Ardian (2009). Penyusunan Pedoman dan Pola Tetap (*Blue Print*); Pemberdayaan Petani Tembakau Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan di Kabupaten Wonosobo
- Budhi dan Ardian A. (2009). Kajian Potensi Sumber Daya Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. Laporan penelitian Kerjasama FE Unissula dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Callois and Aubert (2007). Towards indicators of sosial capital for regional development issue: The case of French rural areas. *Regional studies*, Vol 41.6, August 2007
- Cohen, S., Prusak L. 2001. *In Good Company: How Sosial Capital Makes Organization*
- Coleman, J 1999. *Sosial Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass:
- Darwin MM (2005). Memanusiakan rakyat, penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama pembangunan. Benang Merah Yogyakarta.
- Easterling D (2009). The leadership role of community foundations in building sosial capital. *National civic review*. DOI: 10.1002/nrc.232. Winter 2008
- Esterling D. (2009). *The leadership role of community foundations in building sosial capital. National Civic Review, winter 2009.*
- Fukuyama, Francis (1995). *Trust: The sosial virtues and the creation of prosperity*. New York: the Free Press
- Javed, Kalid, and Arshad (2011). Islamic concept of sosial welfare. *Interdisciplinary journal of contemporary research in business*. Vol 3, No.2 June 2011
- Javed, Khalid, and Arshad (2011). *Islamic concept of sosial welfare. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 3, No.2 June 2011*
- Misbahul dkk. (2007). Model-model kesejahteraan sosial Islam: Perspektif normative, filosofis, dan praktis. PT LIIS Pelangi Aksara, Bantul Yogyakarta
- Ottoson and Klyver (2010). The effect of human capital on sosial capital among entrepreneurs. *Journal of enterprising culture*. Vol 18, No.4 (December 2010)

- Paper, WP/00/74, 1-8. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Sosial Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2006). Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2010
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2006). Strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) Kabupaten Wonosobo.
- Pranaji (2006). Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 24, No. 2, Oktober 2006
- Prawiranegara(2009).Kajian model potensi ekonomi industri masyarakat berbasis agro technopark (ATP): Studi kasus daerah transmigrasi local Koleberes, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.
- Quillian and Redd (2006). Can sosial capital explain persistent racial poverty gaps ? National poverty center working paper series. June 2006*
- Solow, R. M. 1999. *Notes Sosial Capital and Economic Performance*. In Partha D., Ismail S.,
- Suharto E (2005). Analisis kebijakan public, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Alfabeta Bandung.
- Suharto E (2005). Pembangunan, kebijakan sosial, dan pekerjaan sosial. Spectrum Pemikiran, Bandung.
- Suharto E. (2008). Islam, modal sosial dan pengentasan kemiskinan. Indonesia sosial economic outlook, Dompot Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008
- Supriono, Flassy dan Rais (2008). Modal sosial: definisi, dimensi, dan tipologi*
- Yazdani and Yaghoubi (2011). The relationship between sosial capital and organizational justice. *European journal of economics, finance and administrative science*. ISSN 1450-2275 issue 30
- Yoon and Wang (2011). The role of citizenship behaviors and sosial capital in virtual communities. *Journal of computer information systems*. Fall 2011